

### A. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi Dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu,
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu,
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu, dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempunyai tugas pokok :

1. Melaksanakan kegiatan penanaman modal;
2. Melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengaduan;
3. Melaksanakan kegiatan pengawasan, pengelolaan data dan informasi; dan
4. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

### B. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala;
2. Sekretariat terdiri dari :
  - 2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2.2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

3. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
  - 3.1 Seksi Kerjasama dan Promosi;
  - 3.2 Seksi Fasilitasi dan Pengembangan.
4. Bidang Pelayanan dan Pengaduan terdiri dari :
  - 4.1 Seksi Perizinan;
  - 4.2 Seksi Survei; dan
  - 4.3 Seksi Pengaduan dan Advokasi.
5. Bidang Pengawasan Data dan Informasi, terdiri dari :
  - 5.1 Seksi Pengawasan; dan
  - 5.2 Seksi Data dan Informasi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Badan.

### **C. ISU – ISU STRATEGIS**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dalam jangka panjang. Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo adalah :

1. Rendahnya Daya Saing Investasi Daerah,
2. Tingginya Tuntutan Masyarakat terhadap kualitas Pelayanan.

### A. PERENCANAAN

Perencanaan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo didasarkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 – 2022.

Adapun dokumen Renstra tersebut memuat :

#### a. Visi dan Misi

Visi yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mengacu pada visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 – 2022 yakni **“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”**.

Untuk mencapai dari visi tersebut, dirumuskan misi pembangunan yang di antaranya adalah **menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan** serta **mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tentram**.

**Misimenciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan:** peningkatan investasi sangat dipengaruhi adanya iklim investasi yang kondusif yaitu terciptanya situasi yang aman, nyaman, adanya jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha, jaminan keamanan dan insentif serta kemudahan-kemudahan dalam perizinan serta perpajakan. Selain itu juga dengan kesiapan sarana prasarana /infrastruktur dibidang investasi seperti ketersediaan lahan investasi dan infrastruktur pendukung. Kerjasama strategis dan hubungan yang sinergis antar instansi pemerintah dan dunia usaha merupakan katalisator realisasi investasi, disamping itu untuk meningkatkan investasi juga perlu adanya peningkatan daya tarik investasi dengan peningkatan promosi secara intensif dan berkelanjutan. Peningkatan data informasi, pengendalian, pengawasan serta pengembangan Penanaman Modal dan perizinan diperlukan untuk mendukung meningkatnya investasi dan realisasi investasi. Data potensi investasi yang akurat sebagai sumber informasi, pengendalian, pengawasan serta pengembangan Penanaman Modal,

**Misimewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tentram:** peningkatan investasi perlu didukung dengan

Pelayanan Prima dalam bidang investasi. Pelayanan prima tersebut dapat tercapai dengan adanya regulasi/kebijakan yang jelas dibidang investasi, peningkatan SDM yang kompeten dibidangnya serta didukung adanya fasilitas pendukung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang memadai sehingga terwujud pelayanan prima.

a. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) ditetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing investasi daerah.
2. Terwujudnya pelayanan prima perizinan

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) adalah :

1. Meningkatnya realisasi nilai investasi
2. Meningkatnya pelayanan Pelayanan Terpadu.

## **B. PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**

a. Dokumen Perencanaan

Dalam Rencana Kegiatan (Kinerja) Tahunan (RKT), untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, harus ditetapkan indikator sasaran serta target capaian sasaran yang ingin dicapai. Target kinerja DPMPT tahun 2017 adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.1  
Rencana Kinerja Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya nilai investasi	Peningkatan realisasi investasi	Juta Rp.	1.187.550
2	Meningkatnya pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	82,06

### b. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja atau penetapan kinerja antara Bupati dan Kepala DPMPT untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, indikator kinerja utama, serta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja DPMPT tahun 2017 adalah sebagaimana kami sampaikan dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja DPMPT Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
Meningkatnya nilai investasi	Peningkatan realisasi investasi (Juta Rp.)	1.187.550	<b>Program Pelayanan Investasi</b>	<b>417.308.325</b>
			Pelayanan Penanaman Modal	84.420.425
			Pengembangan Penanaman Modal	29.631.075
			Penyelenggaraan promosi penanaman modal	303.256.825
			<b>Program Pemantauan dan Pengawasan Investasi</b>	<b>95.657.400</b>
			Pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	53.999.900

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
			Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	41.657.500
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>168.183.725</b>
			Penyediaan jasa/peralatan perkantoran	73.472.925
			Penyediaan jasa keuangan	25.686.200
			Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	69.024.600
			<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran</b>	<b>242.570.750</b>
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	90.993.500
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	151.577.250
			<b>Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia SKPD</b>	<b>16.650.000</b>
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	16.650.000
			<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>36.865.400</b>
			Penyusunan perencanaan kinerja SKPD	26.073.400
			Penyusunan Laporan Keuangan	5.166.600
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	5.625.400
Meningkatnya pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	82,06	<b>Program Peningkatan Pelayanan Perizinan</b>	<b>318.685.000</b>
			Survey Perijinan	144.661.000
			Penanganan Aduan Masyarakat dan advokasi	25.000.000
			Pelayanan administrasi perijinan	149.024.000

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja DPMPT Tahun 2017

Penilaian kinerja dilakukan dengan mengacu pada Penetapan Kinerja DPMPT Tahun 2017. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Dari data yang dikumpulkan selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja. (Berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010) yaitu:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja:

NO.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Pengukuran Indikator kinerja dari sasaran strategis yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) DPMPT dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasi. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Pengukuran Kinerja DPMPT Kabupaten Kulon Progo TA 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja			Target Akhir Rensrta (2022)	Capaian s/d 2017 terhadap target akhir Renstra 2022	
				2016	2017				
					Target	Realisasi			% Realisasi
1.	Meningkatnya nilai investasi	Peningkatan realisasi investasi	Juta Rp	1.131.936	1.187.550	1.208.722	101,78	1.877.787	64,37 %
2.	Meningkatnya pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	82,06	82,06	82,41	100,43	83,00	99,29 %

Dengan demikian, dari tabel 3.2 diatas menunjukkan bahwahasil pengukuran Kinerja kedua sasaran tersebut terealisasi dengan kategori “Sangat baik”, dengan Interval Nilai Realisasi Kinerja diatas 100 %.

## B. ANALISIS CAPAIANKINERJA

Berdasarkan pada Tabel hasil Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Kulon Progo Tahun 2017 secara rinci capaian masing-masing sasaran strategis dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :



## 1. SASARAN STRATEGIS 1 ( MENINGKATNYA REALISASI NILAI INVESTASI ).

Tabel 3.3

Capaian Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Capaian Kinerja			Target Akhir Rensrta (2022)	Capaian s/d 2017 terhadap target akhir Renstra 2022	
				2016	2017				
					Target	Realisasi			% Realisasi
1.	Realisasi nilai investasi	Jumlah Investasi yang masuk PMA dan PMDN	Juta Rp	1.131.936	1.187.550	1.208.722	101,78	1.877.787	64,37 %

Dilihat dari tabel 3.3, pada tahun 2017 sasaran meningkatnya realisasi nilai investasi ditargetkan 1.187.550 juta rupiah terealisasi 1.208.722 juta rupiah. Capaian indikator kinerja dari sasaran strategis ini masuk dalam klarifikasi sangat baik atau 101,78 %% dari target.

Capaian tahun 2017 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikandari 1.131.936juta rupiah menjadi 1.208.722 juta rupiah.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2022, indikator Realisasi Nilai Investasicapaian tahun 2017 telah tercapai sebesar 64,37 %

Capaian sasaran ini dlakukan melalui beberapa program utama yaitu Program Pelayanan Investasi dengan Kegiatan Pelayanan Penanaman Modal, Pengembangan Penanaman Modal dan Penyelenggaraan promosi penanaman modal; serta Program Pemantauan dan Pengawasan Investasi dengan Kegiatan Pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan, dan Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Faktor pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja untuk capaian indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah semakin tingginya minat investor untuk berinvestasi di Kulon Progo. Hal ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan potensi sumber daya yang ada di Kulon Progo, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Faktor lain adalah upaya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui OPD terkait termasuk DPMPT untuk

menarik Investor agar berinvestasi di Kulon Progo dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo. Yang tidak kalah penting adalah mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk bisa menerima kehadiran investor di Kulon Progo. Selain tu, adanya kepastian hukum bandara juga menjadi salah satu dampak positif dari meningkatnya realisasi nilai investasi di Kulon Progo.

## 2. SASARAN STRATEGIS 2 ( MENINGKATNYA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU )

Tabel 3.4  
Capaian Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Capaian Kinerja			Target Akhir Rensrta (2022)	Capaian s/d 2017 terhadap target akhir Renstra 2022	
				2016	2017				
					Target	Realisasi			Capaian (%)
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	82,06	82,06	82,41	100,43	83,00	99,29 %

Pada tahun 2017, sasaran meningkatnya pelayanan perizinan terpadu dengan Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) ini adalah sebesar 100,43 % dari target 82,06 % terealisasi sebesar 82,41% atau lebih tinggi dari target. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan DPMPT sangat baik meski sarana dan prasarana pelayanan belum representatif, terutama gedung PTSP. Meskipun demikian DPMPT tetap berupaya memberikan pelayanan prima kepada dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2022, capaian tahun 2017 untuk nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 99,29 %% dari target akhir Renstra.

Capaian sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dengan indikator kinerja untuk nilai indeks kepuasan masyarakat ini masih termasuk sangat tinggi dan target telah tercapai. . Program dan kegiatan yang mendukung capaian ini adalah Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dengan kegiatan Survey Perizinan, Penanganan Aduan Masyarakat dan advokasi, serta Pelayanan administrasi perizinan. Dengan capaian kinerja seperti yang kami sajikan di

atas, DPMPT akan terus berupaya untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dan target akhir Renstra bisa tercapai.

Sedangkan untuk Faktor pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja untuk capaian indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah Fasilitasi kemudahan investasi, Jemput bola perizinan, adanya pengawasan perizinan, meningkatnya investasi dibidang perumahan.

## **C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

### **a. PERMASALAHAN**

1. Masih adanya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap masuknya investasi di Kabupaten Kulon Progo.
2. Keterbatasan lahan untuk investasi.
3. Tingginya harga lahan untuk investasi.
4. Belum ada standar yang baku dalam penghitungan nilai realisasi investasi sehingga terjadi perbedaan data realisasi investasi.
5. Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.
6. Belum optimalnya jaringan Sistem Perizinan secara Online.

### **b. SOLUSI**

1. Sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat tentang kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan wilayah, sehingga investasi mendapat dukungan masyarakat.
2. Pendekatan ke masyarakat sehingga tanah milik masyarakat dapat digunakan untuk investasi
3. Pemerintah Kabupaten memfilitasi investor dalam melakukan negosiasi harga tanah dengan pemilik tanah.
4. Untuk penghitungan realisasi invsestasi bagi kepentingan pemerintah pusat maupun provinsi menggunakan data LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal), sedangkan untuk kepentingan daerah realisasi investasi dihitung dengan menggunakan beberapa alat pengumpulan data baik LKPM, data perizinan daerah maupun data investasi dari SKPD terkait.
5. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara optimal.
6. Memanfaatkan jaringan semaksimal mungkin.

#### **D. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA**

Pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya. Penggunaan sumber daya dibedakan menjadi 3 yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran. Khusus untuk anggaran akan dibahas dalam akuntabilitas keuangan.

Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Kulon Progo dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Kulon Progo didukung 37 personil. Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu berdasarkan tingkat pendidikan, didominasi oleh kualifikasi pendidikan SLTA sebanyak 15 orang (40 %), kemudian diikuti oleh pendidikan S1 sebanyak 13 orang (35 %), S2 sebanyak 6 orang (15 %), D3 sebanyak 5 orang (10 %).

Kebutuhan pegawai berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 74 tahun 2010 sebagai berikut :

1. Jabatan Struktural sejumlah 14 orang atau 38 % dari keseluruhan pegawai.
2. Jabatan Fungsional Umum sejumlah 23 orang atau 62 % yang tersebar disekretariat dan semua bidang.

#### **E. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Dari keseluruhan anggaran DPMPPT sebesar Rp.3.599.389.948,13 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.303.469.348,13 dan belanja langsung sebesar Rp. 1.295.920.600,00 terserap dana sebesar Rp.3.535.334.909,00 (98,22%) yaitu belanja tidak langsung sebesar Rp.2.276.770.873,00 (98,84 %) dan belanja langsung sebesar Rp.1.258.564.036,00 atau (96,12 %). Dengan demikian secara keseluruhan anggaran dapat dilakukan efisiensi sebesar Rp. 64.055.039,13 atau sebesar 1,78 %. Apabila digambarkan dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.5  
 Anggaran dan realisasi belanja tahun 2017

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Tidak Langsung	2.303.469.348,13	2.276.770.873,00	98,84
Belanja Langsung	1.295.920.600,00	1.258.564.036,00	97,12
Total	3.599.389.948,13	3.535.334.909,00	98,22

Tabel 3.6  
 Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017

Kinerja					Keuangan			
Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya realisasi nilai investasi	Nilai investasi PMA/PMDN (juta Rp)	1.187.550	1.208.722	101,78%	Program Peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi	417.308.325	413.327.256	99,05
					Pelayanan Penanaman Modal	84.420.425	83.328.240	98,71
					Pengembangan Penanaman Modal	29.631.075	9.592.475	99,87
					Penyelenggaraan promosi penanaman modal	303.256.825	300.406.541	99,06
					Program Pemantauan dan Pengawasan Investasi	95.657.400	94.066.567	98,34
					Pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	53.999.900	53.439.189	98,96

Kinerja					Keuangan			
Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	41.657.500	40.627.378	97,53
Meningkatnya pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,06	82,41	100,43 %	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	318.685.000	312.920.400	98,19
					Survey Perijinan	144.661.000	143.359.800	99,10
					Penanganan Aduan Masyarakat dan advokasi	25.000.000	23.019.600	92,08
					Pelayanan administrasi perijinan	149.024.000	146.541.000	98,33
					<b>JUMLAH</b>	<b>831.650.725</b>	<b>820.314.223</b>	<b>98,64</b>

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa realisasi anggaran kegiatan untuk sasaran strategis meningkatnya realisasi nilai investasi untuk Indikator Kinerja nilai investasi PMA / PMDN realisasi kinerja tercapai 101,78% dan realisasi keuangan tercapai 99,05% untuk Program Peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi dan 98,34% untuk Program Pemantauan dan Pengawasan Investasi. Capaian realisasi keuangan tidak 100 % karena adanya efisiensi anggaran, namun secara fisik sudah 100 %.

Sedangkan untuk sasaran strategis Meningkatkan pelayanan perizinan untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) realisasi kinerja tercapai 100,43 % dan realisasi keuangan tercapai 98,19%. Berdasarkan capaian dari dua sasaran tersebut, indikator kinerja nilai investasi dan nilai indeks kepuasan masyarakat adalah sebesar 101,11%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2017 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja sesuai dengan indikator kinerja masing-masing kegiatan.

Hasil Pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah 101,11%. Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tahun 2017 diketahui bahwa :

1. Indikator Kinerja Utama “ Capaian Realisasi Nilai Investasi PMA / PMDN “ tercapai 1.208.722 juta rupiah dari target 1.187.550 juta rupiah ( terealisasi 101,78% ).
2. Indikator Kinerja Utama “ Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat “ tercapai 82,41 % dari target 82,06% ( terealisasi 100,43 % ).

Berdasarkan kedua sasaran tersebut, terdapat berbagai macam permasalahan dan solusi yaitu :

#### a. PERMASALAHAN

1. Masih adanya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap masuknya investasi di Kabupaten Kulon Progo.
2. Keterbatasan lahan untuk investasi.
3. Tingginya harga lahan untuk investasi.
4. Belum ada standar yang baku dalam penghitungan nilai realisasi investasi sehingga terjadi perbedaan data realisasi investasi.
5. Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.
6. Belum optimalnya jaringan Sistem Perizinan Secara Online.

**b. SOLUSI**

1. Sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat tentang kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan wilayah, sehingga investasi mendapat dukungan masyarakat.
2. Pendekatan ke masyarakat sehingga tanah milik masyarakat dapat digunakan untuk investasi.
3. Pemerintah Kabupaten memfasilitasi investor dalam melakukan negosiasi harga tanah dengan pemilik tanah.
4. Untuk penghitungan realisasi investasi bagi kepentingan pemerintah pusat maupun provinsi menggunakan data LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal), sedangkan untuk kepentingan daerah realisasi investasi dihitung dengan menggunakan beberapa alat pengumpulan data baik LKPM, data perizinan daerah maupun data investasi dari SKPD terkait.
5. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara optimal.
6. Memanfaatkan jaringan yang ada semaksimal mungkin.